

**DAMPAK SOSIAL EKONOMI RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN SIMPANG LIMA DAN JALAN PAHLAWAN KOTA SEMARANG****Aji Wahyu Heriyanto** ✉

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Juli 2012
Disetujui Juli 2012
Dipublikasikan oktober 2012

Keywords:
Relocation,
Socio-Economic,
Street Vendors

Abstrak

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak sosio ekonomi dari relokasi pedagang kaki lima di kawasan simpang lima dan jalan pahlawan kota semarang. penelitian ini menggunakan analisis inferensi dan deskriptif persentase. untuk mengetahui dampak sosioekonomi dilakukan dengan melakukan wawancara dan menyebar kuesioner beberapa pedagang kaki lima di kawasan simpang lima dan jalan pahlawan kota Semarang. hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak sosial dari relokasi pedagang kaki lima di kawasan simpang lima dan jalan pahlawan adalah berdampak positif pada segi sosio ekonomi dimana meningkatkan waktu berusaha hubungan sosial diantara pedagang, kemungkinan dan ketepatan waktu usaha dan dapat meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima. Masih menjadi kendala yang dihadapi pedagang kaki lima adalah dari sisi infrastruktur dan fasilitas setelah mengalami relokasi pemerintah sebagai pengelola diharapkan mampu memperbaiki kawasan pejalan kaki yang rusak dan memperluas ruang parkir.

Abstract

The aim of this research is to know how much is the socio-economic impacts relocation of street vendors at the intersection of Simpang Lima and Pahlawan streets of Semarang City. This research used inferensial analysis and deskriptif percentase. To know the socio-economic impacts, it was done by interviewing and questionairring some street vendors at the intersection of Simpang Lima and Pahlawan streets of Semarang City. The result of this research showed that the social impact of the relocation of street vendors at the intersection of Simpang Lima and a Pahlawan streets of Semarang City a positive impact in terms of the social economy that is improve social relationships among traders, feasibility and convenience of business and can increase the income of street vendors. Still a constraint in terms of infrastructure and facilities faced by street vendors after the relocation government as the manager is expected to be assisted with street vendors rapid response in dealing with the damage to shelter by repairing the damaged parts and providing adequate parking space.

© 2012 Universitas Negeri Semarang

ISSN 2252-6560

✉ Alamat korespondensi:
Gedung C6 lantai 1, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
E-mail: ajiwahyuheriyanto@rocketmail.com

PENDAHULUAN

Sektor informal banyak muncul di perkotaan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Keadaan ini dapat terjadi karena kurangnya perhatian serta dukungan dari pemerintah. Pandangan masyarakat tentang sektor informal adalah solusi terhadap minimnya lapangan pekerjaan yang ada di perkotaan. Sementara pada saat yang sama sektor informal dapat dijadikan sarana untuk mengembangkan bakat pada pengusaha lokal.

Kota Semarang sebagai kota metropolitan yang didukung oleh daerah hinterlandnya, merupakan daya tarik usaha bagi masyarakat ekonomi lemah. Dengan demikian di Semarang tumbuh berbagai macam usaha kecil, baik yang dilakukan oleh penduduk kota maupun para pendatang dari luar daerah Semarang. Usaha kecil yang ada di Kota Semarang terdiri dari usaha kecil formal, usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Pada usaha kecil informal yang paling menonjol dan menjadi salah satu isu strategis Kota Semarang adalah Pedagang Kaki Lima atau sering disebut PKL.

Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan kawasan pusat Kota Semarang yang menjadi kebanggaan warga Semarang sebagai tempat berkumpulnya orang-orang asli Kota Semarang maupun dari daerah lain. Selain itu kawasan ini merupakan salah satu pusat perdagangan di Semarang. Aktivitas niaga (bisnis) yang cukup tinggi di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang mengakibatkan banyaknya pedagang terutama pedagang kaki lima yang tidak tertampung di lokasi-lokasi yang ditetapkan, misalnya di emperan toko, trotoar atau bahu jalan.

Melihat kondisi tatanan dari pedagang

kaki lima yang ada di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan yang masih tidak teratur membuat tata kota menjadi tidak rapi. Hal ini membuat Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan suatu kebijakan dalam rangka penertiban PKL di kawasan tersebut. Salah satu kebijakannya adalah dengan adanya relokasi PKL. Pada tahun 2010 Pemerintah Kota Semarang melakukan relokasi untuk PKL yang berada pada Jalan Pahlawan, meliputi lokasi depan Disperindag, depan Dinsos, dan depan Bank Mandiri. PKL yang berada pada daerah tersebut direlokasi dan ditempatkan di Taman Menteri Supeno dan sebagian di Jalan Imam Barjo. Sesuai dengan rencana Pemerintah Kota Semarang, untuk sebagian PKL yang masih menggunakan tenda di Taman Menteri Supeno dan PKL yang berada di Jalan Imam Barjo sementara berjualan di tempat tersebut, selanjutnya akan dipindah di lingkaran Simpang Lima Kota Semarang. Sedangkan pada tahun 2011 pedagang kaki lima yang berada pada lingkaran luar Kawasan Simpang Lima untuk sementara dipindahkan di Jalan Pleburan, Jalan Imam Barjo dan Jalan D.I Panjaitan.

Tabel 1 menunjukkan jenis pedagang, jumlah pedagang dan jumlah petak pedagang kaki lima Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang. Jenis pedagang kebanyakan merupakan pedagang makanan, yaitu sebanyak 186 pedagang, sedangkan non makanan sebanyak 24 pedagang. Jumlah petak pedagang kaki lima Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang adalah 216 petak. Jumlah petak yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pedagangnya sendiri disebabkan karena pada kawasan tertentu seorang pedagang bisa mempunyai lebih dari satu petak.

Tabel 1. Jenis Pedagang dan Jumlah Pedagang Kaki Lima Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang

No.	LOKASI	JENIS PEDAGANG		JUMLAH PEDAGANG	JUMLAH PETAK
		Makanan	Non Makanan		
1.	Depan SE	23	3	26	26
2.	Depan Living Plaza	9	-	9	9
3.	Depan Disperindag	14	-	14	14
4.	Depan Dinsos	31	-	31	35
5.	Depan Bank Mandiri	19	-	19	19
6.	Depan SMK 7	6	-	6	6
7.	Depan E-Plaza	13	-	13	15
8.	Depan Masjid Baiturrahman	46	-	46	46
9.	Depan Matahari	17	18	35	35
10.	Jalan K.H Ahmad Dahlan	8	3	11	11
JUMLAH		186	24	210	216

Sumber: Dinas Pasar Kota Semarang Tahun 2010

LANDASAN TEORI

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Lokasi berbagai kegiatan seperti rumah tangga, pertokoan, pabrik, pertanian, pertambangan, sekolah dan tempat ibadah tidaklah asal saja atau acak berada di lokasi tersebut, melainkan menunjukkan pola dan susunan yang dapat diselidiki dan dapat dimengerti (Tarigan, 2005:77).

Menurut Hidayat (1987), di Indonesia sudah ada kesepakatan tentang 11 ciri pokok sektor informal sebagai berikut:

Kegiatan usaha tidak terorganisasi dengan baik karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal.

Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai ijin usaha, Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja, Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi tidak sampai ke pedagang kaki lima, Unit usaha mudah keluar masuk dari satu sub sektor ke lain sub sektor, Teknologi yang digunakan bersifat primitif, Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil, Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sambil bekerja, Pada umumnya unit usaha termasuk golongan *one-man enterprise* dan kalau mengerjakan buruh beasal dari keluarga, Sumber dana modal usaha yang umumnya berasal dari tabungan sendiri atau lembaga keuangan yang tidak resmi, Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat desa dari kota berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah ([http//www.google.com/sector-informal; permasalahan dan upaya mengatasinya files;pdf](http://www.google.com/sector-informal;permasalahan%20dan%20upaya%20mengatasinya.files;pdf)), Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal kota yang mengembangkan aktifitas produksi barang dan jasa di luar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar (Evers dan Korf, 2002: 234) selanjutnya menurut *International Labour Organization* (ILO) pedagang kaki lima didefinisikan sebagai sektor yang mudah dimasuki oleh pendatang baru, menggunakan sumber-sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh keluarga berskala kecil, menggunakan teknologi padat karya, ketrampilan yang dibutuhkan dipe-

roleh di luar bangku sekolah, tidak dapat diatur oleh pemerintah dan bergerak di pasar persaingan penuh.

Dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yaitu melayani kebutuhan barang-barang atau makanan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil/terbatas, dalam melakukan usaha tersebut menggunakan peralatan sederhana dan memiliki lokasi di tempat-tempat umum (terutama di atas trotoar atau sebagian badan jalan), dengan tidak mempunyai legalitas formal. Namun pengertian tentang pedagang kaki lima terus berkembang sehingga sekarang menjadi kabur artinya. Mereka tidak lagi berdagang di atas trotoar saja, tetapi disetiap jalur pejalan kaki, tempat-tempat parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman, terminal bahkan di perempatan jalan dan berkeliling ke rumah-rumah penduduk.

Dampak sosial ekonomi dapat dilihat dariacamata positif dan negatif sehingga dapat lebih berimbang dalam memberikan penilaian. Yang bersifat positif yaitu meningkatnya kelayakan dan kenyamanan usaha, terbukanya kesempatan kerja, perubahan status PKL menjadi pedagang legal. Dampak negatif yaitu menurunnya pendapatan, meningkatnya biaya operasional, melemahnya jaringan sosial, dan menurunnya kesempatan pedagang untuk ikut dalam kelompok-kelompok sosial non formal (Suryantika Sinaga, 2004: 134).

Teori Weber mengemukakan bahwa tindakan ekonomi dapat dipandang sebagai tindakan sosial selama tindakan tersebut memperhatikan tingkah laku orang lain. Sebab secara umum, di kalangan pedagang kaki lima terdapat interaksi sosial, hubungan sosial dan jaringan yang dibangun untuk menopang usaha mereka. Untuk menguatkan teori tersebut serta membedakan dari penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini dampak sosial ekonomi relokasi Pedagang Kaki Lima Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang meliputi: hubungan sosial antar pedagang, kelayakan dan kenyamanan usaha serta pendapatan Pedagang Kaki Lima Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi adalah seluruh jumlah pedagang kaki lima pada tahun 2010 di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang yang

berjumlah 210 pedagang. Terdiri dari 137 pedagang kaki lima di Kawasan Simpang Lima dan 73 pedagang kaki lima di Jalan Pahlawan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *proportional cluster random sampling*.

Variabel yang diteliti adalah kondisi sosial dan kondisi ekonomi relokasi pedagang kaki lima serta kendala yang dihadapi pedagang kaki lima Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang setelah adanya relokasi.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, kuesioner dan wawancara. Metode dokumentasi dipakai untuk mengetahui data jumlah pedagang kaki lima, kuesioner digunakan untuk mengetahui dampak sosial, meliputi: hubungan sosial antar pedagang, kelayakan dan kenyamanan usaha serta dampak ekonomi, meliputi: pendapatan pedagang kaki lima sebelum dan sesudah adanya relokasi.

Data dianalisis menggunakan analisis inferensial yang dimaksudkan untuk membandingkan pendapatan pedagang kaki lima sebelum dan sesudah adanya relokasi di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang dan analisis deskriptif persentase digunakan untuk mengetahui hubungan sosial antar pedagang, kelayakan dan kenyamanan usaha serta kendala yang dihadapi oleh pedagang kaki lima setelah adanya relokasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang membawa pengaruh dampak sosial. Adanya relokasi, para pedagang kaki lima merasakan kondisi di tempat berjualan mengalami banyak kemajuan yaitu kondisi tempat berjualan yang aman. Biasanya mayoritas pedagang kaki lima memiliki kedekatan tersendiri dengan para preman, pengamen dan anak jalanan. Para pedagang sering dibuat kesal oleh para preman, terutama dalam masalah uang kutipan. Misalnya, para preman mengutip pedagang dengan dalih uang keamanan. Adanya relokasi pedagang merasa lebih aman dan nyaman melakukan aktivitas mereka tanpa adanya gangguan dari para preman pada saat berada di tempat relokasi. Hal ini dikarenakan pemerintah selaku pengelola memberikan jaminan ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat relokasi sebab para pedagang telah membayar retribusi keamanan. Selain itu, adanya peraturan keamanan yang mengikat antar pedagang kaki lima juga dapat menambah amannya kondisi di tempat relokasi.

Pedagang kaki lima mengakui bahwa di tempat relokasi, kondisinya relatif lebih nyaman. Sebab, di tempat relokasi kondisi kebersihannya terjaga sehingga mewujudkan suasana yang nyaman dalam berjualan. Hal ini ditunjang dengan adanya pengawasan dari pihak pemerintah yang dilakukan setiap sebulan sekali terkait dengan kebersihan dan ketertiban membuat para pedagang kaki lima selalu menjaga kebersihan.

Adanya kepatuhan yang dimunculkan oleh para pedagang ditunjukkan dengan adanya persentase yang tinggi dalam mentaati peraturan-peraturan yang ada, kehadiran dalam pertemuan rutin dan adanya paguyuban pedagang kaki lima menciptakan kerukunan antar pedagang kaki lima yang dapat mengurangi konflik serta kesenjangan antar pedagang. Hal ini juga dapat memberikan manfaat keluhan yang dialami pedagang kaki lima dapat tersampaikan sehingga diharapkan dapat segera teratasi. Selain itu sikap patuh menjadi salah satu elemen penting dalam implementasi suatu kebijakan relokasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang. Kepatuhan dari pedagang memberikan kesempatan yang luas bagi aparaturnya untuk melaksanakan tugasnya sehingga tujuan kebijakan mencapai titik yang optimal. Hal ini karena optimalisasi kebijakan ketertiban umum tidak akan dicapai jika tidak ditunjang oleh kepatuhan dari pedagang kaki lima yang ada.

Bentuk kepatuhan para pedagang kaki lima ini menjadi penunjang terciptanya ketertiban umum. Hal ini karena ketertiban umum dibutuhkan bagi terciptanya kondisi yang baik bagi setiap pedagang kaki lima untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Ketertiban para pedagang kaki lima merupakan aspek terpenting yang menciptakan suatu kondisi yang nyaman bagi masyarakat luas. Ketertiban ini dapat memberikan citra yang baik bagi para pedagang kaki lima.

Dari hasil analisis uji t terhadap pendapatan pedagang kaki lima sebelum dan sesudah adanya relokasi menunjukkan bahwa t hitung $>$ t tabel yaitu $3,409 > 1,66$, hal ini berarti bahwa relokasi memberikan dampak terhadap pendapatan pedagang kaki lima.

Terdapat perbedaan mean sebesar 262.867,647 setelah adanya relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang. Hal ini berarti terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp 262.867,65 setelah adanya relokasi. Peningkatan pendapatan di sebabkan karena setelah

adanya relokasi kondisi tempat berjualan para pedagang kaki lima menjadi lebih aman, tertib dan bersih. Jika tempat berjualan aman, tertib dan bersih, maka akan mewujudkan suasana yang nyaman. Sehingga konsumen tertarik untuk membeli dagangan para pedagang kaki lima.

Secara teknis pelaksanaan program relokasi menemui beberapa kendala. Dari hasil penelitian dilihat dari kendala segi sarana dan prasarana, sebagian besar pedagang kaki lima atau (52,94%) mengeluhkan adanya shelter tempat berjualan yang rusak. Sedangkan kendala dari segi fasilitas pedagang kaki lima sebanyak (32,35%) mengeluhkan lahan parkir yang kurang luas.

Adanya kendala segi sarana prasarana dan fasilitas yang masih dialami pedagang kaki lima setelah relokasi mengurangi suasana kenyamanan tempat berjualan. Adanya shelter tempat berjualan yang rusak seperti atap shelter yang bocor membuat pedagang kaki lima terganggu aktivitasnya dalam berjualan. Kendala lain yaitu lahan parkir yang kurang luas dapat menimbulkan permasalahan baru seperti terjadinya kemacetan dapat mengganggu aktivitas masyarakat pengguna jalan, padahal salah satu tujuan relokasi adalah menciptakan suasana nyaman bagi masyarakat.

Masih adanya kendala dari segi sarana prasarana dan segi fasilitas yang dihadapi pedagang kaki lima setelah adanya relokasi seperti shelter tempat berjualan yang rusak dan lahan parkir yang kurang luas perlu mendapat perhatian dari pihak terkait. Pemerintah setempat selaku pengelola dan pedagang kaki lima hendaknya cepat tanggap dalam menangani adanya kerusakan shelter tempat berjualan dengan membenahi bagian-bagian yang bocor dan rusak agar aktivitas berjualan tidak terganggu. Serta menyediakan lahan parkir yang memadai agar tidak menjadi suatu permasalahan seperti kondisi yang tidak tertib dan terjadinya kemacetan karena saat ini para pembeli banyak yang parkir di pinggir jalan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dampak sosial relokasi pedagang kaki lima yang masuk kategori sangat tinggi di daerah penelitian adalah kontribusi relokasi terhadap kebersihan (84,19%), sedangkan dampak sosial yang masuk dalam kategori tinggi adalah keikutsertaan pedagang kaki lima dalam pertemuan rutin antar pedagang (81,25%), paguyuban antar pedagang kaki lima (63,6%), efek negatif terhadap jumlah pembeli (70,96%), kondisi keama-

nan (77,94%), kondisi ketertiban (74,27%) dan peraturan mengikat antar pedagang kaki lima meliputi: peraturan keamanan (73,16%), peraturan ketertiban (76,47%), peraturan kebersihan (81,25%). Dampak ekonomi berdasarkan hasil uji t terhadap pendapatan pedagang kaki lima menunjukkan t hitung $>$ t tabel ($3,409 > 1,66$) yang berarti relokasi memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan pedagang kaki lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang.

Kendala pedagang kaki lima setelah adanya relokasi menunjukkan kategori rendah meliputi: kendala segi sarana prasarana (48,16%) dan kendala segi fasilitas (47,06%).

Masih adanya kendala dari segi sarana prasarana dan segi fasilitas yang dihadapi pedagang kaki lima setelah adanya relokasi seperti shelter tempat berjualan yang rusak dan lahan parkir yang kurang luas perlu mendapat perhatian dari pihak terkait. Pemerintah setempat selaku pengelola dan pedagang kaki lima hendaknya cepat tanggap dalam menangani adanya kerusakan shelter tempat berjualan dengan cara: (a) memperbaiki bagian-bagian yang bocor dan rusak agar aktivitas berjualan tidak terganggu, (b) menyediakan lahan parkir yang memadai agar tidak menjadi suatu permasalahan seperti kondisi yang tidak tertib dan terjadinya kemacetan karena saat ini para pembeli banyak yang parkir di pinggir jalan, (c) perlu adanya penambahan fasilitas umum seperti: MCK.

Pemerintah (Dinas Pasar Kota Semarang) perlu menekankan adanya tanggung jawab bersama dengan cara melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang yang dilakukan setiap dua mingguan untuk memelihara bangunan fisik seperti: shelter, fasilitas dan sarana prasarana agar kebersihan serta kenyamanan dalam berjualan dapat berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astriyanto, Teguh. 2010. *Analisis Lokasi Usaha Sektor Informal Bidang Perdagangan dan Jasa di Lingkungan Kampus Universitas Negeri Semarang Desa Sekaran Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Budi, Ari Sulisty. 2009. *Kajian Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi PKL Serta Preferensi*

- ensi Masyarakat Sekitar di Kota Pemalang. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Evers, Hans Dieters dan Rudiger, Korf. 2002. *Urbanisasi di Asia Tenggara : Makna dan Kekuasaan di Ruang – Ruang Sosial*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Huda, Syamsul. 2010. *Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- P. Eko Prasetyo. 2003. *Model Keputusan Pemilihan Lokasi Usaha*. Jurnal Sains dan Teknologi Sinergi. Yogyakarta: Pusat Penelitian Universitas PGRI.
- Pemerintah Kota Semarang, Dinas Pasar. 2008. *Buku Saku Pedagang Kaki Lima*. Semarang.
- Rachbini, Didik, J dan Abdul Hamid. 1994. *Ekonomi Informal Perkotaan Gejala Involusi Gelombang Kedua*, Jakarta : LP3ES.
- Sinaga, Suryantika. 2004. *Dampak Sosial Kebijakan Pemda DKI Jakarta Tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima di Lokasi Binaan Studi Kasus di Lokasi Binaan Paal Merah Jakarta Pusat*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suprobo, Tara, Ukur Tarigan, Ingan dan Weiss, Daniel. 2007. *Laporan Teknis sektor Informal di Indonesia dan Jaminan Sosial*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Surya Perdhana, Mirwan. 2006. *Analisis Pengaruh Lokasi Terhadap Kesuksesan Usaha (studi Kasus Usaha Salon di Semarang)*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Undip.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tjiptono, Fandy. 2006. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Umar, Husein. 1998. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta : PT Grafindo Persada.